

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN KOPERASI
PASCA PENCABUTAN PSAK 27 TENTANG
AKUNTANSI KOPERASI
(STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PEMALANG)**

Oleh:

Djumiko¹⁾, Adi Wiratno¹⁾, Margani Pinasti¹⁾

E-mail: adiwiratno08@yahoo.com

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The Revocation of PSAK 27 about cooperative accounting by Ikatan Akuntans Indonesia (IAI), have brought an impact on financial statements cooperative presentation of movement. Lack of causing cooperative socialization of government took steps that is not uniform in drafting cooperative financial report. The aim of this research is beginning to provide input government and movement cooperative relating to financial reporting standards implementation cooperative after the revocation PSAK 27.

This research using a qualitative approach to a case study model. Data resources in this research are 6 (six) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) considered a great KPRI viewed from business volume and the profit and loss at the end of 2012. The data analysis technic in this research using model developed by miles and huberman, including: data collection, data reduction, data display and withdrawal conclusion.

The result of this research is to find evidence that all KPRI used as a source of data still apply PSAK 27 as reference in the cooperative financial statement. There are three factors affecting the implementation of standards in the cooperative financial reporting, KPRI in Pemalang, namely:1) Using of the cooperative accounting software, 2) Training about cooperative accounting from the government, 3). Socialization related government regulation of financial reporting standards cooperative. KPRI in Pemalang declare ready to apply SAK ETAP as a reference drafting the financial reporting cooperative, after the revocation PSAK 27, as long as of government regulation that regulates it.

Keywords: *Revocation of PSAK 27, cooperative accounting, SAK ETAP.*

PENDAHULUAN

Tanggal 23 Oktober 2010, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 Tentang Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Koperasi. Hal ini berdampak pada

perubahan penyajian laporan keuangan koperasi yang semula mengacu pada PSAK 27. Pada periode berikutnya yaitu tepatnya tanggal 1 Januari 2011, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) telah dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah yang memenuhi dua kriteria, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan koperasi harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Atas dasar pernyataan tersebut tentunya dengan dicabutnya PSAK 27 tentang akuntansi koperasi, maka koperasi harus mencari bentuk standar pelaporan keuangan yang baku sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Belum adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur penerapan standar akuntansi untuk gerakan koperasi, membuat koperasi mengalami kebingungan dalam penerapan standar pelaporan keuangan yang harus diikuti.

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan penyajian informasi akuntansi dan pelaporan keuangan koperasi banyak dilakukan dengan menggunakan variabel penerapan PSAK 27 dan pengaruhnya terhadap kesehatan usaha koperasi. Antara lain dilakukan oleh Khafid, *et al* (2009) dimana hasil penelitian tersebut penerapan PSAK 27 tentang akuntansi koperasi, berpengaruh terhadap kesehatan usaha koperasi yang diukur dengan tiga indikator yaitu pertumbuhan volume usaha, pertumbuhan *net assets* dan pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian atas penerapan SAK ETAP pada koperasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian atas penerapan SAK ETAP lebih berfokus pada UMKM sebagai obyek penelitian. Karena memang SAK ETAP diadopsi dari *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium Enterprises (SME)*, maka entitas yang banyak mengaplikasikan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh Sarifah (2012) menemukan hasil bahwa pengusaha kecil dan menengah di kota Semarang sebagian besar menerapkan SAK ETAP. Penerapan tersebut didorong oleh semangat ingin meningkatkan mutu dan kualitas laporan keuangan UMKM dimata auditor dan kreditur.

Fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana KPRI di Kabupaten Pemalang dalam menerapkan standar akuntansi keuangan koperasi pasca pencabutan PSAK 27, (2) faktor apa saja yang menentukan penerapan standar akuntansi keuangan koperasi pada KPRI di Kabupaten Pemalang pasca pencabutan PSAK 27, (3) standar pelaporan keuangan seperti apa yang dapat diterapkan koperasi dan memberikan manfaat bagi perkembangan KPRI di Kabupaten Pemalang.

Menjawab pertanyaan penelitian menggunakan model penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2012), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Pemalang

Jumlah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Pemalang, menurut laporan akhir tahun 2012 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang (Diskoperindag) sebanyak 85 unit koperasi. Keberadaan KPRI di Kabupaten Pemalang mendapat tempat tersendiri sebagai badan usaha yang berbasis pada kesejahteraan anggota. Fakta ini terungkap dari laporan akhir tahun 2012 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang. Jumlah anggota KPRI sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 11.612 dengan volume usaha sebesar Rp 88.028.432.283,- dan total SHU sebesar Rp 2.233.849.322,-. Hal ini berarti bahwa KPRI di Kabupaten Pemalang sangat dipercaya oleh anggota. Laporan tersebut juga menunjukkan volume usaha dan SHU yang diperoleh KPRI pada akhir tahun 2012 merupakan yang terbesar jika dibanding dengan jenis koperasi lain. Ketika anggota puas akan layanan koperasi, maka anggota akan percaya terhadap koperasi sehingga dapat meningkatkan volume usaha dan SHU koperasi.

Unit usaha yang dimiliki oleh KPRI Kabupaten Pemalang adalah unit usaha simpan pinjam dan unit pertokoan. Dari 85 unit KPRI di Kabupaten Pemalang, seluruhnya memiliki usaha simpan pinjam. Sedangkan KPRI yang membuka usaha pertokoan dan usaha simpan pinjam sekaligus, sebanyak 19 unit koperasi. Keanggotaan KPRI yang homogen, yaitu terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), membuat pengelolaan KPRI menjadi lebih sederhana dan mudah dalam pengendalian. Hal ini karena kepentingan anggota dalam satu KPRI sama, sehingga jarang terjadi permasalahan internal koperasi berkaitan dengan pengelolaan.

Demografi Sumber Data dan Informan

Berdasarkan kriteria sumber data, terpilih ada 6 KPRI yang dijadikan sumber data penelitian. Keenam KPRI tersebut dianggap mewakili seluruh jumlah KPRI yang ada di Kabupaten Pemalang. Artinya, hasil penelitian di enam KPRI tersebut dapat mewakili kondisi pelaporan keuangan di 85 KPRI yang ada di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1. Demografi sumber data

| No | Nama KPRI | Jumlah Anggota | Tingkat Pendidikan | | | Volume Usaha (dalam rupiah) | SHU (dalam rupiah) |
|----|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Ketua | Pengurus Sekretaris | Bendahara | | |
| 1. | KPRI Setia | 140 | S1 | S1 | S1 | 3.363.502.700 | 56.266.937 |
| 2. | KPRI Garuda | 407 | S1 | S1 | S1 | 4.686.156.410 | 78.040.293 |
| 3. | KPRI Handayani | 339 | S2 | S2 | S1 | 1.247.399.426 | 26.264.199 |
| 4. | KPRI Pamungkas | 901 | S1 | S2 | S1 | 5.057.823.115 | 400.977.538 |
| 5. | KPRI Koperda | 665 | S2 | S2 | S1 | 4.336.333.309 | 61.476.010 |
| 6. | KPRI Andalan | 505 | S1 | S1 | S1 | 5.187.750.798 | 40.469.364 |

Informan pada penelitian ini di tiap KPRI ditetapkan terdiri atas: pengurus, karyawan dan anggota. Kriteria pengurus yang dijadikan informan merupakan pengurus yang memahami laporan keuangan. Pengurus yang berkompeten dengan penyusunan laporan keuangan koperasi adalah sekretaris. Karena di tiap KPRI sekretaris yang bertanggung jawab atas

penyusunan laporan keuangan. Karyawan KPRI yang terpilih sebagai informan adalah karyawan yang bertugas di bagian akuntansi. Karena penyusunan laporan keuangan koperasi dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi beserta pengurus, maka karyawan bagian akuntansi dianggap mewakili informan karyawan untuk pengungkapan laporan keuangan koperasi.

Pejabat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Pemilihan informan tersebut karena dianggap lebih memahami kondisi laporan keuangan koperasi di Kabupaten Pemalang. Setiap tahun, gerakan koperasi di Kabupaten Pemalang selalu mengirimkan laporan keuangan koperasi ke Diskoperindag melalui Kasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Selain alasan tersebut, Kasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Diskoperindag Kabupaten Pemalang, juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pemalang, sehingga dianggap lebih berkompeten terhadap pelaporan keuangan koperasi.

Deskripsi Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Koperasi di KPRI Kabupaten Pemalang

KPRI di Kabupaten Pemalang, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan 4, yaitu pejabat di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, seluruhnya menyusun laporan keuangan pada setiap akhir periode atau akhir tahun.

Sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat Diskoperindag tersebut, hasil temuan dan wawancara yang dilakukan pada sumber data, yaitu pada enam KPRI di Kabupaten Pemalang, menemukan bukti bahwa memang KPRI di Kabupaten Pemalang menyusun laporan keuangan. Berikut tabel penyusunan laporan keuangan yang dihimpun dari seluruh sumber data dalam penelitian ini:

Tabel 2. Jawaban Wawancara Penyusunan Laporan Keuangan

| No | Sumber Data | Penyusunan Laporan Keuangan | | |
|----|----------------|---|----------|--|
| | | Pengurus | Karyawan | Anggota |
| 1. | KPRI Setia | Ya | Ya, | Ya, selalu menyusun laporan keuangan |
| 2. | KPRI Garuda | Ya selalu menyusun laporan keuangan | ya | Ya, selalu |
| 3. | KPRI Handayani | Ya setiap tahun pasti | Ya | Ya, selama saya menjadi anggota, koperasi setiap tahun membuat laporan keuangan yang disajikan dalam RAT |
| 4. | KPRI Pamungkas | Koperasi selalu menyusun laporan keuangan | Ya | Ya selalu menyusun laporan keuangan |
| 5. | KPRI Koperda | Ya | Ya, | Ya, selalu menyusun laporan keuangan menjelang rapat tahunan, |
| 6. | KPRI Andalan | Ya | Ya | Selalu menyusun laporan keuangan setiap tahun sekali |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Periodisasi penyusunan pelaporan keuangan di masing-masing KPRI berbeda-beda. Hal ini terungkap dari wawancara langsung kepada para informan di masing-masing KPRI. Sumber data di KPRI Setia, secara konsisten menyebut bahwa penyusunan laporan keuangan KPRI Setia adalah bulanan.

Selain KPRI Setia, beberapa KPRI di Kabupaten Pemalang yang dijadikan sumber data juga secara konsisten tiap pengurus sebagai informan, menyebutkan pelaporan keuangan di koperasi mereka adalah bulanan dan tahunan. Tetapi beberapa informan dari unsur anggota, karena mereka menerima pelaporan keuangan koperasi tiap akhir tahun, atau saat menjelang dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka mereka menjawab penyusunan laporan keuangan koperasi adalah tahunan.

Berdasarkan studi dokumen Rapat Anggota Tahunan, terungkap bahwa paling tidak setiap akhir tahun KPRI di Kabupaten Pemalang menyusun pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut selalu dilaporkan kepada anggota dan instansi lain pada akhir tahun, umumnya menjelang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Sementara untuk KPRI Andalan dan KPRI Koperda, masing-masing pengurus menjawab singkat “Ya”, artinya laporan keuangan yang dibuat oleh KPRI tersebut selalu dilaporkan pada anggota dan instansi lain, minimal pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Tabel 3. Distribusi laporan keuangan akhir tahun KPRI Kabupaten Pemalang

| No | Sumber Data | Distribusi laporan | |
|----|----------------|--------------------|---------------|
| | | Anggota | Instansi lain |
| 1. | KPRI Setia | Ya | Ya |
| 2. | KPRI Garuda | Ya | Ya |
| 3. | KPRI Handayani | Ya | Ya |
| 4. | KPRI Pamungkas | Ya | Ya |
| 5. | KPRI Koperda | Ya | Ya |
| 6. | KPRI Andalan | Ya | Ya |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Berkaitan dengan koreksi atau masukan atas penyusunan laporan keuangan koperasi, masing-masing sumber data memiliki tanggapan yang beragam. Hal ini dapat dimaklumi karena tiap-tiap koperasi memiliki karakter anggota yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda pula. Masukan atau koreksi dari anggota oleh pengurus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan koperasi pada periode mendatang.

Wawancara yang dilakukan terhadap sumber data menyebutkan bahwa setiap Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan oleh koperasi, selalu ada koreksi atau masukan dari anggota. Sebagai gambaran, tabel berikut menyajikan keberadaan koreksi yang diberikan oleh anggota maupun instansi lain terkait penyusunan laporan keuangan koperasi

Tabel 4. Jenis Koreksi terhadap Laporan Keuangan KPRI

| No | Sumber Data | Koreksi atas Laporan Keuangan |
|----|----------------|--|
| 1. | KPRI Setia | Kalau dari anggota pernah ada, tetapi kalau dari instansi lain tidak ada pak |
| 2. | KPRI Garuda | Koreksi selalu ada dari anggota dalam RAT |
| 3. | KPRI Handayani | masukan pasti ada, koreksi pasti ada |
| 4. | KPRI Pamungkas | Koreksi dari anggota biasanya masalah piutang |
| 5. | KPRI Koperda | Ada masukan, koreksi |
| 6. | KPRI Andalan | Ya |

Kesadaran yang dimiliki oleh KPRI di Kabupaten Pemalang untuk menggunakan jasa audit independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit pelaporan keuangannya tergolong relatif rendah. Dari KPRI yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, hanya KPRI Garuda Randudongkal yang laporan keuangannya sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Meski tidak diaudit oleh akuntan independen, tetapi seluruh pengurus KPRI mengungkapkan bahwa laporan keuangan mereka selalu diaudit oleh intern dari KPRI, yaitu dilakukan oleh Badan Pengawas yang dipilih melalui Rapat Anggota.

Tabel 5. Audit atas Laporan Keuangan Koperasi

| No | Sumber Data | Ya/Tidak | Audit Laporan Keuangan |
|----|----------------|----------|------------------------------|
| | | | Lembaga yang mengaudit |
| 1. | KPRI Setia | Ya | Badan Pengawas (Internal) |
| 2. | KPRI Garuda | Ya | KAP Dr. Rahardja (Eksternal) |
| 3. | KPRI Handayani | Ya | Badan Pengawas (Internal) |
| 4. | KPRI Pamungkas | Ya | Badan Pengawas (Internal) |
| 5. | KPRI Koperda | Ya | Badan Pengawas (Internal) |
| 6. | KPRI Andalan | Ya | Badan Pengawas (Internal) |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Tidak adanya sanksi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, mahalnya biaya audit dan jarak KAP yang jauh dari gerakan koperasi, ditambah minimnya sosialisasi atau promosi dari pihak KAP berkaitan manfaat yang diperoleh koperasi jika mereka mengaudit laporan keuangan di KAP, merupakan faktor pemicu tingkat kesadaran dari KPRI di Kabupaten Pemalang untuk menggunakan jasa KAP.

Kondisi Pelaporan Keuangan KPRI di Kabupaten Pemalang Pasca Pencabutan PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi

Pencabutan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada bulan Oktober 2010, ternyata kurang direspon oleh gerakan koperasi di Kabupaten Pemalang, khususnya KPRI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPRI di Kabupaten Pemalang masih menggunakan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi, sebagai acuan dalam menyusun pelaporan keuangan. Hal ini terungkap dari studi dokumen laporan keuangan yang diperoleh dari masing-masing KPRI di Kabupaten Pemalang yang dijadikan sumber data dan hasil wawancara langsung dengan pengurus, karyawan dan anggota KPRI.

Studi dokumen yang dilakukan terhadap pelaporan keuangan koperasi di KPRI Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa KPRI yang dijadikan sumber data dalam penelitian

ini masih menggunakan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi. Hal ini terlihat dari jenis laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing KPRI masih mengacu pada ketentuan dalam PSAK 27. Misalnya dalam laporan arus kas, menyajikan saldo kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas pada akhir periode. Sedangkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, mengharuskan gerakan koperasi untuk menggunakan SAK ETAP sebagai acuan dalam menyusun pelaporan keuangan koperasi. Laporan arus kas yang disyaratkan dalam SAK ETAP adalah mengungkapkan aliran kas ditelusuri dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Neraca yang disajikan oleh KPRI juga masih mengacu pada PSAK 27. Hal ini nampak dalam penyebutan istilah aktiva yang memang muncul dalam PSAK 27, sedangkan jika menggunakan SAK ETAP, istilah aktiva diganti dengan aset.

Fakta menarik yang ditemukan dari studi dokumen terhadap laporan keuangan koperasi adalah bahwa KPRI di Kabupaten Pemalang secara bertahap sudah menggunakan SAK ETAP meskipun hal ini tidak disadari oleh pihak pengurus maupun karyawan koperasi. Pelaporan keuangan koperasi yang dibuat oleh KPRI Kabupaten Pemalang sudah menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, dimana laporan ini disyaratkan dalam SAK ETAP. Disamping itu, KPRI juga tidak lagi membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota, yang memang disyaratkan dalam PSAK 27. Artinya, dari studi dokumen terhadap laporan keuangan KPRI, ditemukan bukti bahwa KPRI di Kabupaten Pemalang mencampurkan ketentuan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan SAK ETAP yang diharuskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Tabel 6. Jenis Laporan Keuangan Koperasi yang disusun KPRI

| No | Sumber data | Jenis Laporan Keuangan | | | | |
|----|----------------|------------------------|-----|-------------------|----------|------|
| | | Neraca | PHU | Perubahan ekuitas | Arus Kas | CALK |
| 1. | KPRI Setia | √ | √ | √ | √ | - |
| 2. | KPRI Garuda | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3. | KPRI Handayani | √ | √ | - | - | √ |
| 4. | KPRI Pamungkas | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5. | KPRI Koperda | √ | √ | √ | - | √ |
| 6. | KPRI Andalan | √ | √ | √ | √ | √ |

Sumber : Brosur RAT KPRI Tutup Tahun Buku 2012

Tabel 5. diatas menunjukkan bahwa ada tiga KPRI yang dijadikan sumber data, menyajikan laporan keuangan secara lengkap, meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ketiga KPRI tersebut adalah KPRI Garuda, KPRI Pamungkas dan KPRI Andalan. Studi terhadap dokumen brosur RAT KPRI tutup tahun buku 2012 juga menemukan bukti bahwa hanya KPRI Garuda yang menyebutkan jenis laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan kelima KPRI lain yang dijadikan sumber data, berbeda dalam penyebutan arus kas dan perubahan ekuitas. Kelima KPRI tersebut menyebut laporan arus kas dalam laporan keuangan sebagai laporan sumber dan penggunaan dana, dan menyebut laporan perubahan ekuitas dengan ikhtisar perubahan kekayaan bersih koperasi.

Kepatuhan Pengurus KPRI terhadap Standar atau Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Anggota KPRI yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ketika ditanya apakah pelaporan keuangan koperasi yang disusun oleh pengurus bersama dengan karyawan sudah sesuai standar atau pedoman yang berlaku, seluruh anggota yang dijadikan informan menjawab bahwa pelaporan keuangan KPRI sudah sesuai dengan standar, tentunya dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan.

Tabel 7. Tanggapan anggota berkaitan dengan kepatuhan pengurus KPRI dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar atau panduan

| No | Sumber data | Tanggapan Anggota |
|----|----------------|-----------------------|
| 1. | KPRI Setia | Sesuai dengan panduan |
| 2. | KPRI Garuda | Sesuai dengan panduan |
| 3. | KPRI Handayani | Sesuai dengan panduan |
| 4. | KPRI Pamungkas | Sesuai dengan panduan |
| 5. | KPRI Koperda | Sesuai dengan panduan |
| 6. | KPRI Andalan | Sesuai dengan panduan |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Hasil wawancara mengenai penerapan SAK ETAP di KPRI Kabupaten Pematang Jaya yang dilakukan terhadap pengurus KPRI menemukan bukti bahwa hanya pengurus KPRI Handayani yang secara faktual memahami SAK ETAP. Berikut hasil wawancara dengan pengurus KPRI Handayani :

“Secara faktual saya faham (SAK ETAP)”.

Jawaban yang diungkapkan oleh pengurus KPRI Handayani tersebut tidak sejalan dengan jawaban pada pertanyaan wawancara lanjutan. Ketika pengurus KPRI Handayani diminta untuk menyebutkan jenis laporan keuangan yang disusun oleh koperasi, Beliau menjawab kurang memahami jenis laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pengurus KPRI Handayani kurang memahami SAK ETAP. Berikut jawaban pengurus KPRI Handayani tentang penyebutan jenis laporan keuangan koperasi.

Tabel 8. Pemahaman KPRI terhadap SAK ETAP

| No | Sumber Data | Pemahaman terhadap SAK ETAP | |
|----|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | Pengurus | Karyawan |
| 1. | KPRI Setia | Tidak Memahami | Tidak Memahami |
| 2. | KPRI Garuda | Tidak Memahami | Tidak Memahami |
| 3. | KPRI Handayani | Tidak Memahami | Tidak Memahami |
| 4. | KPRI Pamungkas | Tidak Memahami | Tidak Memahami |
| 5. | KPRI Koperda | Tidak Memahami | Tidak Memahami |
| 6. | KPRI Andalan | Tidak Memahami | Tidak Memahami |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Faktor yang Menentukan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi pada KPRI Kabupaten Pematang Jaya Pasca Pencabutan PSAK 27

Temuan penelitian berkaitan dengan faktor penentu penerapan standar akuntansi keuangan koperasi pasca pencabutan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi pada KPRI Kabupaten Pematang Jaya, diperoleh fakta yang beragam. Berikut faktor penentu penerapan standar

akuntansi keuangan koperasi di KPRI Kabupaten Pemalang pasca pencabutan PSAK 27 yang diperoleh dari wawancara dengan informan pada masing-masing sumber data.

1. Penggunaan Software Akuntansi Koperasi

Keberadaan *software* sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi juga telah dirasakan oleh KPRI di Kabupaten Pemalang. KPRI Garuda merupakan KPRI di Kabupaten Pemalang yang telah menggunakan *software* akuntansi koperasi untuk membantu aktivitas pekerjaan akuntansi. Adanya *software* yang terintegrasi tersebut, secara otomatis membuat pelaporan keuangan KPRI Garuda merujuk pada standar pelaporan keuangan yang disematkan dalam *software*.

Hasil wawancara dengan pengurus maupun karyawan KPRI Garuda, menyebutkan bahwa mereka menjadikan *software* akuntansi koperasi sebagai pedoman dalam menyusun pelaporan keuangan KPRI Garuda.

2. Diklat Akuntansi Koperasi

Berkaitan dengan *workshop* atau diklat tentang akuntansi koperasi, seluruh KPRI yang dijadikan sumber data menjawab mereka pernah mengikuti diklat ataupun *workshop* tentang akuntansi koperasi. Jadi pengetahuan pengurus maupun karyawan KPRI tentang pelaporan keuangan koperasi, banyak diperoleh dari materi diklat yang diikuti pengurus maupun karyawan. Hasil wawancara kepada pengurus maupun karyawan KPRI diperoleh fakta bahwa mereka pernah mengikuti diklat tentang akuntansi koperasi.

Tabel 9. Keikutsertaan KPRI dalam diklat atau *workshop* akuntansi koperasi

| No | Sumber Data | Keikutsertaan dalam Diklat | |
|----|----------------|----------------------------|-------------|
| | | Pengurus | Karyawan |
| 1. | KPRI Setia | Pernah ikut | Pernah ikut |
| 2. | KPRI Garuda | Pernah ikut | Pernah ikut |
| 3. | KPRI Handayani | Pernah ikut | Pernah ikut |
| 4. | KPRI Pamungkas | Pernah ikut | Pernah ikut |
| 5. | KPRI Koperda | Pernah ikut | Pernah ikut |
| 6. | KPRI Andalan | Pernah ikut | Pernah ikut |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Pejabat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa setidaknya setahun sekali pihak Diskoperindag secara rutin memberikan diklat akuntansi koperasi bagi gerakan koperasi di Kabupaten Pemalang.

Hasil wawancara dengan pejabat Diskoperindag Kabupaten Pemalang tersebut mengindikasikan bahwa penyusunan pelaporan keuangan yang saat ini dilakukan oleh KPRI Kabupaten Pemalang juga dipengaruhi oleh materi diklat akuntansi koperasi. Menurut Ir. H. Bambang Suharto, Diskoperindag Kabupaten Pemalang rutin memberikan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan koperasi, artinya proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing KPRI juga mendapat pembimbingan dan arahan dari pejabat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang.

3. Sosialisasi Regulasi dari Pemerintah

Keberadaan regulasi dari pemerintah sebagai payung hukum gerakan koperasi dalam melaksanakan aktivitas akuntansi koperasi sangat diperlukan. Koperasi sebagai badan usaha yang banyak tergantung pada kebijakan dan bantuan pemerintah tentunya memerlukan pengakuan dari pemerintah, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan. Sebelum tahun 2011, gerakan koperasi mendasarkan penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi. Pemerintah juga mengakui bahwa hanya laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 27 yang dianggap benar.

Bulan Oktober 2010, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 Tentang Pencabutan PSAK 27, sehingga secara otomatis mulai awal tahun 2011 PSAK 27 efektif tidak berlaku. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan KPRI Kabupaten Pemalang belum mengetahui tentang pencabutan PSAK 27. Dari enam KPRI yang dijadikan sumber data, hanya pengurus KPRI Setia yang menyatakan mengetahui bahwa PSAK 27 telah dicabut, selebihnya baik pengurus maupun karyawan menyatakan tidak mengetahui pencabutan PSAK 27 oleh IAI.

Tabel 10. Pengetahuan KPRI mengenai pencabutan PSAK 27 dan pernyataan KPRI terkait sosialisasi pencabutan PSAK 27 dari Pemerintah

| No | Sumber Data | Pencabutan PSAK 27 | | Sosialisasi Pencabutan | |
|----|----------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------|
| | | Pengurus | Karyawan | Pengurus | Karyawan |
| 1. | KPRI Setia | Mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |
| 2. | KPRI Garuda | Tidak mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |
| 3. | KPRI Handayani | Tidak mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |
| 4. | KPRI Pamungkas | Tidak mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |
| 5. | KPRI Koperda | Tidak mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |
| 6. | KPRI Andalan | Tidak mengetahui | Tidak mengetahui | Belum ada | Belum ada |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Keterangan yang diungkapkan baik oleh pengurus maupun karyawan KPRI, dibenarkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Ir. H. Bambang Suharto, mengungkapkan bahwa KPRI di Kabupaten Pemalang belum beralih ke SAK ETAP, pasca pencabutan PSAK 27 oleh IAI.

Standar Pelaporan Keuangan Seperti Apa yang Dapat Diterapkan oleh KPRI Kabupaten Pemalang dan Memberi Manfaat bagi Perkembangan Koperasi

Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing KPRI memiliki banyak manfaat atau kegunaan. Temuan penelitian dari hasil wawancara, baik kepada pengurus, karyawan maupun anggota mengungkapkan hal yang sama, yaitu mereka sepakat bahwa laporan keuangan yang disusun KPRI memiliki manfaat atau kegunaan. Meskipun masing-masing informan mengungkapkan manfaat yang berbeda-beda dari penyusunan laporan keuangan, tetapi benang merah yang dapat diambil dari wawancara pada masing-masing informan adalah

penyusunan pelaporan keuangan tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota dan untuk kemajuan serta perkembangan koperasi.

Tabel 11. Manfaat laporan keuangan koperasi

| No | Sumber Data | Manfaat Laporan Keuangan Koperasi | | |
|----|----------------|--|---|---|
| | | Pengurus | Karyawan | Anggota |
| 1. | KPRI Setia | Alat evaluasi perkembangan koperasi | Alat evaluasi untuk menilai kemampuan koperasi dalam membayar SHU anggota | Mengetahui besaran SHU yang diterima |
| 2. | KPRI Garuda | Mengetahui tingkat kesehatan koperasi | Mengetahui tingkat kesejahteraan anggota | Mengetahui besaran SHU yang diterima |
| 3. | KPRI Handayani | Mengetahui kekayaan koperasi | Mengetahui kekayaan anggota | Mengetahui perkembangan koperasi |
| 4. | KPRI Pamungkas | Syarat pengajuan bantuan atau pinjaman ke lembaga keuangan | Mengetahui posisi kekayaan koperasi | Mengetahui kekayaan koperasi dan SHU yang diterima |
| 5. | KPRI Koperda | Mengetahui tingkat kesehatan koperasi | Bukti pertanggungjawaban dan untuk mengetahui kesehatan koperasi | Mengetahui kekayaan koperasi dan SHU yang diterima |
| 6. | KPRI Andalan | Mengetahui kekayaan koperasi | Mengetahui posisi keuangan koperasi | Mengetahui besaran SHU yang diterima, dan mengetahui posisi keuangan koperasi |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPRI Kabupaten Pemalang dan Kasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa manfaat laporan keuangan koperasi antara lain :

- a. Sebagai alat evaluasi untuk menilai perkembangan dan kesehatan koperasi.
- b. Untuk mengetahui kekayaan koperasi.
- c. Sebagai bukti pertanggungjawaban pengelola koperasi.
- d. Untuk mengetahui besaran SHU yang akan diterima anggota.
- e. Untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam membayar SHU.
- f. Sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan pemerintah.

Tabel 11. Kemungkinan diterapkannya SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi

| No | Sumber Data | Kemungkinan diterapkannya SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi |
|----|----------------|--|
| 1. | KPRI Setia | Mungkin, karena pernah disarankan oleh Pejabat Diskoperindag saat RAT tahun 2012 |
| 2. | KPRI Garuda | Sangat mungkin bisa diterapkan |
| 3. | KPRI Handayani | Sangat mungkin bisa diterapkan |
| 4. | KPRI Pamungkas | Mungkin, sepanjang ada kebijakan dari Diskoperindag Kabupaten Pemalang |
| 5. | KPRI Koperda | Tidak tahu dan tidak berpendapat |
| 6. | KPRI Andalan | Mungkin, sepanjang ada peraturan dari pemerintah |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Saran yang diungkapkan oleh masing-masing informan, terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menata pelaporan keuangan koperasi, mereka mengungkapkan bahwa pemerintah hendaknya sering melakukan sosialisasi dan pembinaan rutin pada gerakan koperasi.

Pengurus KPRI Handayani juga mengungkapkan hal yang sama. KPRI Handayani menyarankan, pelatihan yang diadakan hendaknya komprehensif dengan melibatkan institusi pajak.

Pihak karyawan KPRI mengungkapkan hal yang sama dengan pengurus terkait masukan atau saran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menata pelaporan keuangan koperasi. Mereka sepakat agar pemerintah rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus, serta terprogram untuk kemajuan gerakan koperasi. Karyawan juga berpendapat, sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan, mereka meminta pada pemerintah sebaiknya panduan atau pedoman dalam akuntansi koperasi tidak berubah-ubah.

Tabel 12. Saran pengurus dan karyawan KPRI terkait penyusunan laporan keuangan koperasi

| No | Sumber Data | Saran KPRI terkait Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi | |
|----|----------------|--|---|
| | | Pengurus | Karyawan |
| 1. | KPRI Setia | Pemerintah hendaknya memberikan pembinaan secara rutin dan berkala | Segera melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang aturan standar akuntansi koperasi terbaru, jika memang ada standar atau aturan baru |
| 2. | KPRI Garuda | Pemerintah harus memberikan pembinaan rutin dengan datang ke masing-masing koperasi agar minimal satu Kabupaten dalam menyusun laporan keuangan koperasi, harus sama dan seragam | Harus sering dilakukan diklat dan pembinaan |
| 3. | KPRI Handayani | Diklat atau pelatihan yang dilaksanakan pemerintah terkait dengan akuntansi koperasi harus komprehensif dengan melibatkan pihak kantor pajak, agar koperasi mengetahui tata cara penyusunan laporan keuangan menurut ketentuan pajak | Sering dilakukan diklat dan pembinaan-pembinaan |
| 4. | KPRI Pamungkas | Pemerintah harus sering menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada gerakan koperasi | Melakukan sosialisasi yang tegas tentang aturan baru yang harus diikuti |
| 5. | KPRI Koperda | Jika ada peraturan terbaru mengenai akuntansi koperasi, hendaknya pemerintah segera mengadakan sosialisasi kepada gerakan koperasi | Melakukan sosialisasi tentang pedoman akuntansi dan jangan berubah-ubah (pedoman akuntansi koperasi) |
| 6. | KPRI Andalan | Mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan | Seluruh koperasi harus diseragamkan dalam penyusunan laporan keuangan. |

Sumber : Transkrip wawancara yang telah diolah

Peran pemerintah yang diharapkan oleh KPRI Kabupaten Pematang berkaitan dengan pelaporan keuangan koperasi, berdasarkan tabel 12 diatas dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Pemerintah hendaknya segera memberikan sosialisasi kepada koperasi, terkait dengan keberadaan standar atau pedoman pelaporan keuangan koperasi terbaru, jika memang ada perubahan.
- b. Pemerintah hendaknya sering memberikan pembinaan secara rutin dan berkala kepada gerakan koperasi.
- c. Pemerintah hendaknya sering menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang akuntansi koperasi yang komprehensif serta terjadwal kepada gerakan koperasi.
- d. Pemerintah hendaknya segera menyeragamkan pelaporan keuangan di masing-masing koperasi.

Uji Keabsahan Data

Uji Pemeriksaan Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji pemeriksaan derajat kepercayaan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui empat cara, yaitu meliputi :

- a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen tidak hanya dilakukan pada waktu yang singkat, tetapi dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Proses pengambilan data di masing-masing sumber data dilakukan selama 3 bulan, yaitu pada periode Maret, April dan Mei 2013. Hal ini dilakukan peneliti untuk menghasilkan data yang benar-benar valid, melalui wawancara dengan tiga informan dan observasi langsung aktivitas akuntansi di masing-masing sumber data.
- b. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti tidak hanya melakukan wawancara, tetapi peneliti juga melakukan studi dokumen terhadap penyajian laporan keuangan koperasi akhir tahun 2012, dimasing-masing KPRI sumber data. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dapat dilengkapi dengan temuan pada dokumen laporan keuangan koperasi.
- c. Triangulasi, teknik ini dilakukan dengan melakukan perbandingan data. Uji triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui :
 1. Perbandingan informasi yang diperoleh berkaitan dengan pertanyaan penelitian antar sumber data. Jumlah sumber data yang lebih dari 1, memudahkan dilakukannya proses perbandingan informasi.
 2. Perbandingan informasi antar informan dalam 1 sumber data. Tiap sumber data diambil 3 informan yang terdiri dari: pengurus, karyawan dan anggota koperasi. Uji triangulasi dilakukan dengan membandingkan jawaban wawancara antara pengurus, karyawan dan anggota dalam 1 sumber data.
 3. Perbandingan hasil temuan wawancara dengan hasil studi dokumen dan observasi langsung pada masing-masing sumber data.
- d. Kecukupan referensial peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan alat perekam audio yang dilengkapi dengan transkrip wawancara, sehingga memungkinkan dijadikan patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.

Uji Pemeriksaan Keteralihan (*Transferability*)

Hasil temuan penelitian di KPRI Kabupaten Pematang sebagai sumber data utama, memerlukan perbandingan untuk mengetahui keteralihan data yang diperoleh. Peneliti

melakukan observasi, studi dokumen dan wawancara terhadap sumber data di luar KPRI untuk keperluan tersebut. Terpilih sebagai referensi adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Pemalang. Dipilihnya KJKS Pemalang karena memiliki struktur pengelolaan yang lebih baik dari KPRI, yaitu antara lain : KJKS Pemalang telah membuka kantor cabang pembantu di tiga wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Moga. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh seluruh KPRI Kabupaten Pemalang, sehingga dengan mendekati pelayanan kepada anggota, diharapkan KJKS Pemalang memiliki struktur pengelolaan yang lebih baik dari KPRI Kabupaten Pemalang.

Seluruh pertanyaan penelitian yang terungkap dalam wawancara dengan pihak KPRI Kabupaten Pemalang, seluruhnya sejalan dengan keterangan yang terungkap dari hasil penelitian di KJKS Pemalang. Kondisi pelaporan keuangan di KJKS Pemalang sama dengan kondisi di KPRI Kabupaten Pemalang. Terkait dengan pedoman atau panduan dalam menyusun laporan keuangan, KJKS kaitannya dengan diklat atau pelatihan mengenai akuntansi koperasi, manajer KJKS Pemalang mengungkapkan bahwa tiap tahun mereka selalu rutin mengirimkan utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut manajer KJKS Pemalang menyebutkan telah mengetahui bahwa PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi sudah dicabut oleh IAI. Tetapi KJKS Pemalang masih menerapkan PSAK 27 dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini karena dipengaruhi oleh *software* akuntansi yang mereka gunakan.

Saran yang disampaikan pihak KJKS Pemalang terkait dengan penataan laporan keuangan koperasi juga sejalan dengan pernyataan dari KPRI yang dijadikan sumber data. Manajer KJKS Pemalang mengungkapkan bahwa pemerintah hendaknya sering melakukan sosialisasi dan pembinaan-pembinaan rutin pada masing-masing koperasi.

Hasil yang terungkap dari penelitian pada sumber data diluar KPRI, yaitu pada KJKS Pemalang tersebut, menyimpulkan bahwa kondisi akuntansi koperasi di Kabupaten Pemalang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan, tidak jauh berbeda. Temuan tersebut sekaligus menyimpulkan bahwa koperasi di Kabupaten Pemalang sangat patuh terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Setiap materi diklat dan pembinaan yang diberikan oleh Diskoperindag Kabupaten Pemalang terhadap gerakan koperasi, langsung ditindaklanjuti dan diterapkan dalam aktivitas akuntansi gerakan koperasi. Sehingga ketika Diskoperindag Kabupaten Pemalang belum melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang aturan akuntansi koperasi terbaru, maka gerakan koperasi di Kabupaten Pemalang juga belum menerapkan aturan atau standar tersebut. Meskipun gerakan koperasi mengetahui tentang aturan standar akuntansi koperasi terbaru, sepanjang belum ada sosialisasi dan pelatihan dari Diskoperindag, maka mereka belum menerapkannya.

Uji Pemeriksaan Ketergantungan (*Dependability*)

Uji ketergantungan berkaitan dengan dengan kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Adanya rekaman audio hasil wawancara dengan informan pada masing-masing sumber data yang konsisten antar informan, menunjukkan telah dilakukannya uji ketergantungan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan jawaban masing-masing informan dalam 1 sumber data dan antar sumber data terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sama.

Penarikan kesimpulan juga didasarkan pada studi dokumen terhadap laporan keuangan akhir tahun 2012 yang disajikan oleh masing-masing KPRI sumber data. Keterangan

hasil wawancara, direkam dalam bentuk audio dan transkrip, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap dokumen laporan keuangan, serta tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan terhadap pertanyaan penelitian pada enam sumber data KPRI Kabupaten Pemalang yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan studi dokumen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seluruh KPRI di Kabupaten Pemalang yang dijadikan sumber data menyusun laporan keuangan.
2. Periodisasi penyusunan laporan keuangan di KPRI Kabupaten Pemalang yang dijadikan sumber data, seluruhnya dibuat bulanan.
3. Laporan keuangan yang dibuat oleh KPRI selalu dilaporkan atau didistribusikan kepada anggota koperasi dan instansi lain dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pemalang menjelang dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4. Laporan keuangan yang disusun oleh KPRI Kabupaten Pemalang, selalu mendapat masukan atau koreksi dari anggota saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Masukan tersebut berkisar pada penyajian angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan koperasi.
5. Kesadaran pihak KPRI Kabupaten Pemalang atas audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen, masih sangat rendah. Dari keenam KPRI yang dijadikan sumber data, hanya KPRI Garuda yang telah mengaudit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Meski demikian, dari hasil wawancara, terungkap bahwa KPRI Kabupaten Pemalang telah mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas (pihak internal KPRI).
6. Laporan keuangan yang disusun oleh seluruh KPRI Kabupaten Pemalang yang dijadikan sumber data adalah Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU).
7. Penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun 2012 di masing-masing KPRI yang dijadikan sumber data, masih berpedoman pada PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi.
8. Pemahaman pengurus dan karyawan KPRI terhadap SAK ETAP sebagai pengganti PSAK 27 yang telah dicabut oleh IAI sangat rendah.
9. Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan standar pelaporan keuangan koperasi pada KPRI Kabupaten Pemalang pasca pencabutan PSAK 27, yaitu :
 - a. Penggunaan *software* akuntansi koperasi yang terintegrasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan koperasi.
 - b. Diklat tentang akuntansi koperasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang terhadap gerakan koperasi, turut menentukan bentuk dan jenis laporan keuangan dimasing-masing KPRI.
 - c. Sosialisasi regulasi dari pemerintah terkait dengan pedoman atau standar pelaporan keuangan koperasi yang berlaku.
10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat enam manfaat penyusunan laporan keuangan koperasi, yaitu :
 - a. Sebagai alat evaluasi untuk menilai perkembangan dan kesehatan koperasi.
 - b. Untuk mengetahui kekayaan koperasi.
 - c. Sebagai bukti pertanggungjawaban pengelola koperasi.

- d. Untuk mengetahui besaran SHU yang akan diterima anggota.
 - e. Untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam membayar SHU.
 - f. Sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan pemerintah.
11. Terkait kemungkinan diterapkannya SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, seluruh KPRI yang menjadi sumber data menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diterapkan sepanjang ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah.
 12. Saran yang diberikan KPRI Kabupaten Pemalang untuk pemerintah terkait penerapan standar akuntansi koperasi, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah hendaknya segera memberikan sosialisasi kepada koperasi terkait dengan keberadaan standar atau pedoman pelaporan keuangan koperasi terbaru, jika memang ada perubahan.
 - b. Pemerintah hendaknya sering memberikan pembinaan secara rutin dan berkala kepada gerakan koperasi.
 - c. Pemerintah hendaknya sering menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang akuntansi koperasi yang komprehensif serta terjadwal kepada gerakan koperasi
 - d. Pemerintah hendaknya segera menyeragamkan pelaporan keuangan di masing-masing koperasi.

REFERENSI

- Adrian Muluk, Muhammad. 2006. *Mengenal Potensi Usaha Koperasi*. <http://infobisnisq.blogspot.com/2010/02/mengenal-potensi-usaha-koperasi.html>. Download 20 Desember 2012.
- Ahra, Kim. 2012. *Teori Akuntansi*. <http://theearthdew.wordpress.com/tag/teori-akuntansi/>. Download 23 Januari 2013.
- Apsari, E. Sri. 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan untuk Koperasi*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Ardiwidjadja, Andang K.2008. *Rangkuman Konsep Akuntansi Berbasis PSAK 27/Reformat 2007*. Bandung. Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat.
- Atkins, Allen B. *et al.* 2013. *Case Studies in Finance & Accounting*. Hyderabad. Kaizen Publications.
- Auliyah, Iim M. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik Sidoarjo. *Artikel Ilmiah*. STIE Perbanas. Surabaya.
- Ball, Ray. And Philip Brown. 1968. An Emperical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Reseach*. PP, 159-178.
- Ball, Ray. And P. Kothari. 1991. Security Return Around Earnings Announcement. *Accounting Review*. PP, 3-18.
- Bamidele And Spencer J. Hensen. 2007. The Effect of Cooperative Thrift and Credit Societies on Personal Agency Belief : a Study of Entrepreneurs in Osun State, Negeria. *African Journal of Agricultural Reseach*. Vol. 2 PP, 678-686. University of Guelph. Canada.
- Beaver, William H. 1968. The Information Content of Annual Earning Announcements.

Journal of Accounting Reseach. PP, 67-92.

- Belkaoui, AR. 2006. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung. Penerbit Angkasa.
- Chariri, Anis. 2009. Ethical Culture and Financial Reporting : Understanding Financial Reporting Practice within Javanese Perspective. *Issues in Social and Environmental Accounting*. Vol.3 No. 1, PP.45-65.
- Devi, Uma dan S.R.K. Govt. 2012. The Role of Credit Cooperative in the Agricultural Development of Andhra Pradesh, India. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 2, P.55-64.
- Dick, Wolfgang and Franck Missionier P. 2010. *Financial Reporting Under IFRS, A Topic-based Approach for Students*. Chichester-UK. John Wiley & Sons, Inc.
- Galluzzo, Nicola. 2012. Multifunctionality in Agriculture anda Developmnet of Cooperative Credit Banks: A Comparative Analysis in Italy and Ireland. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 1, P.1-8.
- Hanel, Alfred. 1985. *Basic Aspects of Cooperative Organizations and Policies for Their Promotion in Developing Countries*. University of Marburg. West Germany.
- Harsono. 1985. Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Malang. *Disertasi*. Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Henama, Unathi Sonwabile. 2012. Trade Union Savings and Credit Operatives: The Case of National Education, Health and Allied Workers, Savings and Credit Coopetaive in South Africa. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 1, P.25-36.
- International Co-operative Alliance (ICA). 2001. *Jati Diri Koperasi, ICA, Cooperative Identity Statement : Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad ke-20. Terjemahan, Ibnu Soedjono*. Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : DSAK IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No.8*. Jakarta : DSAK IAI.
- Indriantoro, Nur dan B. Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Juwono, Tri A. 2010. Metode Penelitian Komunikasi. Jakarta. *Artikel*. Fikom- Universitas Mercubuana.
- Kassali, A.O. Adejobi, dan Okparaocha. 2013. Analysis of Cooperative Financial Performance In Ibadan Metropolis, Oyo State, Nigeria. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.2, No. 1, P.10-15.
- Kieso, D.E., dan J.J. Weygandt. 2012. *Accounting Principles 10e*. USA. John Wiley & Sons, Inc.
- Khafid, Muhammad, *et al*. 2009. Analisis PSAK 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan

- Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha pada KPRI. Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.2 No. 1, FE UNNES.
- Marshall, David H. *et al.* 2011. *Accounting : What the Numbers Mean*. New York. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Munshid, Zainal dan Rosli Bin Mahmood. 2012. The Relationship between Group Cohesiveness and Performance: An Empirical Study of Cooperatives Movement in Malaysia. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 1, P.15-20.
- Reddy, Krishna dan Stuart Locke. 2013. History and Development of Cooperative Business in New Zealand: A Case Study of Allied Farmers Limited. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 1, P.15-20.
- Ropke, Jochen. 2003. *The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries With Special Reference of Indonesia*. University of Marburg. Germany.
- Sarifah, Hani'atun. 2012. Analisis Persepsi SAK ETAP Terhadap Kinerja Usaha Pada UMKM se-Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Vol.1, No.2. Jurusan Akuntansi, FE UNNES.
- Scott, W.R. 2012. *Financial Accounting Theory*. Toronto-Canada. Prentice-Hall International Inc.
- Shleifer, Andrey. 2005. Understanding Regulation. *European Financial Management Journal*, Vol.11, No.4. 439-451. Harvard University.
- Sitio, Arifin. dan H.Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Swasono, Sri Edi. 1985. *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2005. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2012. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2012. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi*. Jakarta.
- Warren, Carl S., *et al.* 2007. *Accounting 22E*. Masion-Ohio USA. Thomson South-Western.
- Watts, R.L., J.L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs-New Jersey. Prentice-Hall International Inc.
- Wolk, Harry, James L Dodd, and Michael G. Tearney. *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, 6e*. Masion-Ohio USA. Thomson South-Western.
- Yin K., Robert. 2005. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Zaimova, Darina, *et al.* 2012. Cooperative Movement and Rural Development in Bulgaria: Policy Support and Practical Implementation. *International Journal of Cooperative Studies*. Vol.1, No. 2, P.47-54.